

“ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

ILHAM SUYUTI IKHSAN
NIM.10500113124

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Suyuti Ikhsan
NIM : 10500113124
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 03 Februari 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum/S1
Alamat : Perum. Bumi Zarindah Blok T 3. Japing, kab. Gowa
Judul : Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Juni 2017

Penyusun

Ilham Suyuti Ikhsan

NIM: 10500113124

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR", yang disusun oleh Ilham Suyuti Ikhsan, NIM: 10500113124, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2017 M, bertepatan dengan 20 Ramadhan 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 15 Juni 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H, M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Ahkam Jayadi, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: St. Nurjannah, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang lurus seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritis dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang sudah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terimakasih atas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Muh. Ikhsan dan Ibunda Megawati serta Adik-adik penulis Husnul Khatimah, Resky Aulia dan Nabila Revalina Ikhsan yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Ibu Istiqamah, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H. selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Ahkam Jayadi, S.H.,M.H. selaku penguji I dan Ibu St. Nurjannah, S.H.,M.H. selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,.
7. Kepada Mudhar Azir Mannuruki, Ahmad Rais Karnawan, Muh. Arif, Putri Lestari Syam, Nurul Wahyuni Aris, Wiwi Wardani, Nurul Tasioja, dan keluarga besar Ilmu Hukum 2013, terimakasih atas motivasi serta dukungan yang selama ini diberikan;
8. Kepada Sahabatku, Muh. Nur Khutbanullah Lissalam dan Muh. Hasan atas kebersamaan dan pengalaman yang berharga serta selama ini serta memberikan kritikan dan saran yang sifatnya memotivasi penulis.

9. Seluruh teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 53 Dusun Erelembang, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa yang selalu mendukung selama penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Makassar, 14 Juni 2017

Penulis

Ilham Suyuti Ikhsan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15-67
A. Pidana dan Pemidanaan.....	15
B. Narapidana	30
C. Remisi	40
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	48
E. Hak Asasi Manusia	58

BAB III METODE PENELITIAN	68-71
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	68
B. Pendekatan Penelitian.....	68
C. Sumber Data	69
D. Metode Pengumpulan Data	69
E. Instrumen Penelitian.....	70
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72-110
A. Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lapas Klas I Makassar	72
B. Efektifitas Pemberian Remisi di Lapas Klas I Makassar	102
BAB V PENUTUP.....	111-112
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113-115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus terkait hak asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar? 2). Bagaimana efektivitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dilakukan sesuai dengan pasal 34 dan 34 A ayat 1 PP Nomor 99 tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Serta Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Efektifitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala-kendala khususnya pada syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana khusus sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang pengetatan pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” (*input*) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (*out put*) kembali pada masyarakat seperti sedia kala. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas meliputi : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi yang kita kenal dengan nama : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Pidana penjara dalam

pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan.¹

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Manusia yang menjalani pidana penjara untuk tujuan penghukuman di Negara manapun dalam sejarah pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara eropa barat juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap narapidananya, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara. Kedua fungsi pemidanaan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya. Pemidanaan pada saat ini lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat.²

¹ J.E. Sahetapy. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) hal. 90.

² Bambang Waluyo, ., *Pidana dan Pemidanaan, cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika.)*. hal. 96

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Keadilan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang, sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, secara khusus terdapat dalam Pasal 34, 34 A, 34B, 34C, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan, kemudian proses pelaksanaannya di tuangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi dewasa ini mengalami berbagai macam penolakan, hal ini karena adanya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan di antaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia. Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD. yang menegaskan, pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP)³, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

³ [www.kompas.com/Indra Akuntano. Deytri Robekka Aritonang. batasi remisi dengan undang-undang](http://www.kompas.com/Indra_Akuntano.Deytri_Robekka_Aritonang.batasi_remisi_dengan_undang-undang). Diakses pada tanggal 20 November 2016.

Uraian di atas menurut penulis menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia bertentangan dengan landasan idiologi negara Indonesia yaitu Pancasila, setidaknya pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (sila 2) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila 5). Hak non diskriminasi ini kembali dinyatakan dalam Pasal 27 ayat(1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para narapidana didalam pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan. Hak tersebut juga melanggar Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 20 *International Covenant on Cultur and Politic Right* (ICCPR) yang pada intinya menyatakan persamaan hak di muka hukum.

Ketentuan memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi terhadap narapidana kasus korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan transnasional telah menimbulkan kerugian besar bagi negara, masyarakat dan korban. Kekeliruan ini menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Sesungguhnya alasan pemberatan hukuman yang merupakan wewenang (Yudikatif) Majelis Hakim, bukan wewenang kebijakan pemerintah (Eksekutif). Ketentuan *Justice Collaborator* sebagai syarat pemberian Remisi terhadap pelaksanaan pidana di Indonesia adalah melanggar HAM dan berpotensi terjadi pemerasan terselubung yang kedua. Ketentuan *Justice Collaborator* dan PP Nomor : 99 Tahun 2012 Pasal 34A ayat 1 huruf a tidak relevan dengan masa pembinaan warga binaan karena syarat *Justice Collaborator* seharusnya bagian dari strategi penyidikan yang bertujuan membongkar organisasi kejahatan dengan kompensasi keringanan hukuman atau pembebasan penuntutan. Akibat kekeliruan

pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi menimbulkan gejolak di dalam Lapas. Gangguan keamanan dan ketertiban sering terjadi karena PP Nomor : 99 Tahun 2012 menuai pro dan kontra. Penilaian yang menyatakan bahwa pemerintah arogan dalam membatasi hak- hak narapidana untuk memperoleh remisi. Narapidana senantiasa akan menjalani segala bentuk putusan yang diterima asalkan pengaturannya sesuai dengan nilai- nilai keadilan. Reaksi perdebatan terhadap pengaturan PP Nomor : 99 Tahun 2012 juga terjadi diberbagai kalangan termasuk di kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut sering kita saksikan di media yang mana pengamat hukum maupun praktisi hukum membicarakan pemberian remisi yang dinilai diskriminatif, dan pengaturannya yang tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni Undang- undang.

Berdasarkan uraian di atas jelas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memiliki problematik yang secara tidak langsung tentunya mempengaruhi efektivitas pemberian remisi tersebut, oleh karena itu maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul : **Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Klas I Makassar.**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang diatas maka tercapailah poin fokus sebagai representasi dari fokus penelitian yaitu hak narapidana khusus. Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami fokus penelitian kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut.

Orientasi penelitian ini dibatasi pada hak narapidana khusus, disamping hak-hak atas pidana umum. Adapun hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan dan efektifitas pemberian remisi bagi narapidana

tindak pidana khusus di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Penelitian mengenai pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan penelitian yang ditujukan kepada narapidana tindak pidana khusus di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar yang memiliki problematik yang secara tidak langsung tentunya mempengaruhi efektivitas pemberian remisi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus terkait hak asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?
2. Bagaimanakah efektifitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

1. Dwidja Priyatno dalam bukunya “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia” mengungkapkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapt dalam hukum pidana di Indonesia, sebagaimana

termaktub dalam psala 10 KUHPidana. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Bagi negara indonesia yang bedasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan yang salah satu didalamnya dinamakan remisi. Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

2. Rahman Syamsuddin dalam bukunya “Merajut Hukum di Indonesia” memulai tulisannya dengan membahas sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses), masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu dengan yang lainnya saling bergantung. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pada hakekatnya hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil. Terlepas dari pembagian tersebut menurut penulis bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang di atur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.

3. Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Hukum Panitensier Indonesia” menjelaskan bahwa pidana merupakan bukan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis negeri belanda, karena mereka seringkali menyebut tentang tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, sehingga ada beberapa penulis ditanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis belanda itu. Secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan. Sementara pembedanaan itu sendiri dapat diartikan sebagai penetapan hukum untuk suatu peristiwa.
4. Ruslan Renggong dalam bukunya “Hukum Acara Pidana” mengatakan Lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dahulu lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sistem pemasyarakatan merupakan satu

rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

5. Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” mengungkapkan secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya tidak hanya berlainan, tetapi kadang sering bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Dalam upaya memberikan rambu-rambu tersebut, hukum pidana memberikan batasan yang sangat luas dan cakupan dari banyak segi. Hal ini kadang memberikan kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh aspek pengertian hukum pidana yang sangat luas itu, karena dalam memberikan batasan tentang hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi

saja sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada diluarnya. Namun demikian pemberian batasan tersebut tetap berguna karena setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan mendalam.`

6. Mohammad agung firmansyah dalam skripsinya “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana khusus” pemberian remisi pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Kemasyarakatan Klas IA di Kota Semarang di lakukan yang di sesuai dengan pasal 34 PP No.99 Tahun 2012 dan 34 A ayat 1 PP No.99 tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan peraturan menteri Hukum dan Ham No.21 tahun 2013 tentang tata cara pemberian Remisi Asi milasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat. pemberian remisi pada narapidana khusus berdasarkan PP No.99 tahun 2012 belum berjalan secara optimal oleh karena masih terdapat kendala-kendala khususnya program-program pembinaan dari petugas lapas Klas I A Semarang belum dapat diterima sepenuhnya dan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh narapidana.
7. Adi Sujatno dalam bukunya “Negara Tanpa Penjara” Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi

warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.

8. Suharjo dalam bukunya berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” mengatakan Pelaksanaan pidana penjara dalam arti perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menganut suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Suhardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu). Hal tersebut terungkap dalam orasinya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman, yang diucapkan pada upacara penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal Juli 1963. Dalam orasinya itu, Suhardjo, antara lain mengemukakan konsep tentang hukum nasional dan konsep tentang perlakuan terhadap narapidana. Menyangkut perlakuan terhadap narapidana, Suhardjo menyatakan: “Dibawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan : disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Dengan singkat, tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.” Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konfrensi Dinas para pimpinan Kopenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

9. Marie Muhammad dalam Skripsinya “PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II SUNGGUMINASA” Pemberian remisi terhadap narapidana bagi tindak pidana narkoba pada umumnya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Namun dalam perkembangannya remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan remisi tapi juga dengan asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat. Perubahan tersebut guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dimana pemberian remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdiri atas dua jenis remisi umum dan remisi khusus.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
- b. Menjelaskan efektifitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang pemahaman pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan informasi mengenai sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia terkhusus pada pemberian remisi kepada setiap narapidana/ Warga Binaan.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat, mahasiswa, aparat penegak hukum dan narapidana itu sendiri untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan remisi sebagai suatu hak bagi narapidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut sebagai istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara oleh seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹ Menurut Sudarto Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.² Menurut Prof. Van Hammel³ arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :

Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond vandie overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.

Sedangkan pemidanaan menurut Sudarto, adalah sinonim dari kata penghukuman, yang berarti⁴ :

“penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga menyangkut hukum perdata. Pemidaan dalam bidang pidana, yang kerap kali berakronim dengan pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.”

¹ Said Sampara, Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media). hal. 97

² Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media) hal 191.

³ Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia edisi kedua. Cet.II.* (Jakarta: Sinar Grafika). hal. 33.

⁴ Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia edisi kedua. Cet.II..* hal. 35

Pemidaan dalam islam juga telah ditetapkan dalam beberapa surah maupun ayat yang ada didalam Al-qur'an, salah satunya terdapat pada QS. An-Nisa: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat

Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.

Berdasarkan definisi tersebut, pembedaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana. Dilihat dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan atau pemberian pidana, tidak hanya menyangkut pemberian pidana saja tetapi undang-undang yang telah ada sebelumnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu⁵:

a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana

- 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*;
- 2) Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ataat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu kenyataan dan menimbulkan akibat.

Perlu diketahui juga bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan unsur *wederrechtelijk* itu telah dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifat *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-

⁵ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia*. hal 196

undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang tindakan itu dipandang sebagai perilaku tercela. Dari uraian tersebut diatas secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:⁶

- 1) Subyek;
- 2) kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum; (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Tidak terdapat keseragaman pandangan atau definisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama sebagai berikut⁷ :

- 1) Perbuatan aktif atau pasif. Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan aktif apabila perbuatan itu dilakukan secara sadar atau tanpa disadari, sedangkan

⁶ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).* hal. 79

⁷ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 83-115*

pasif walaupun tidak dilakukan secara langsung namun ia dapat dikenakan suatu perbuatan pidana.

- 2) Akibat. Yang dikatakan akibat hanya pada delik materiil adalah akibat tertentu dalam delik materiil sehingga KUHP sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada pembuat delik.
- 3) Melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertulis saja, sehingga merupakan unsur tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang dimaksud melawan hukum materiil yaitu melawan hukum dalam arti luas dimana sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja, yaitu sebagai dasar-dasar hukum pada umumnya tetapi juga termasuk melawan hukum menurut pandangan masyarakat.
- 4) Keadaan yang menyusul atau tambahan. Dikatakan keadaan yang menyusul atau tambahan apabila perbuatan itu merupakan permufakatan jahat dan terlaksana tanpa adanya pelaporan pada yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu pula misalnya dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP adalah kewajiban untuk melapor pada pihak berwajib jika mengetahui terjadi sesuatu kejahatan. Kalau kejahatan itu betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
- 5) Keadaan yang secara objektif yang memperberat Pidana. Dikatakan secara objektif memperberat pidana adalah terletak pada keadaan objektif pembuat delik. Misalnya dalam tindak pidana kekerasan, apabila mengakibatkan luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP.
- 6) Tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah patut dan

benar. Contoh dari alasan pembeda ini adalah regu tembak yang melaksanakan eksekusi pidana mati pada terpidana mati. Dalam hal ini regu tembak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya perintah jabatan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 51 KUHP. Alasan pemaaf adalah dasar yang menghilangkan unsur kesalahan pada terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum. Contoh alasan pemaaf adalah tidak dapat dipidanya seseorang apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak sehat akal atau tidak waras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP dan juga di dalam perumusan perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, yang ditandai dengan adanya asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan tindak pidana juga diharapkan sedapat mungkin memenuhi ketentuan kepastian hukum.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu Buku Kedua tentang kejahatan yaitu secara rinci di atur mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, dan Pelanggaran sebagaimana yang secara rinci diatur dalam Buku Ketiga mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Untuk lebih jelasnya KUHP telah mengatur beberapa macam delik di antaranya, yaitu⁸ :

⁸ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 121-122*

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran. KUHP menempatkan Kejahatan dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, yang nampaknya tidak ada penjelasan yang sepenuhnya memuaskan. Namun secara sederhana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan, serta kepatutan dalam masyarakat, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sementara delik undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.
- 2) Delik Formil dan Delik Materiil. Pada umumnya rumusan delik dalam KUHP adalah rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksedentialia atau hal yang kebetulan. Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHP, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 209 sampai dengan Pasal 210 KUHP tentang Penyuapan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya dalam delik pencurian maka sudah cukup dikatakan telah terjadi delik pencurian. Demikian juga dalam delik penghasutan jika delik penghasutan sudah dilakukan, tidak disyaratkan apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya, di dalam delik materiil titik beratnya adalah pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap sudah selesai jika

akibatnya sudah terjadi. Cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Bahwa yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya boleh bermacam-macam seperti mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya. Van Hammel kurang setuju dengan pembagian delik formal dan materiil ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan formal dan delik yang dirumuskan materiil.

- 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*, *Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan atau *schuld*. Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur rumusan kesengajaan itu dengan tegas seperti dengan adanya kata “dengan sengaja”, atau mungkin juga dengan kata yang senada seperti “diketahuinya”, dan sebagainya. Contohnya adalah dalam Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338, dan sebagainya. Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan atau kelalaian yaitu dengan menggunakan kata “karena kealpaannya”, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah “karena kesalahannya”.
- 4) Delik *Commissionis* dan delik *Omissionis*, pelanggaran hukum dapat berbentuk sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Delik *commissionis* misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa delik *commissionis* adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. Sementara pada delik *omissionis* adalah sebaliknya yaitu perbuatan yang harus dilakukan contoh pada Pasal 164 KUHP mengenai tidak dilaporkannya adanya pemufakatan jahat. Di samping itu, ada yang disebut delik *commissionis per*

ommissionem commisa. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak tersebut meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat dalam KUHP.

5) Delik Aduan dan Delik Biasa. Delik aduan atau *Klacht delict* adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Pihak yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif, di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP.

6) Jenis delik yang lain, diantaranya, yaitu⁹ :

- a. Delik berturut-turut (*voortezt delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan berulang kali dengan mencuri seratus ribu rupiah setiap kali mencuri.
- b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain. Cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.

⁹ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia*. hal 197-200

- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di waktu malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4 KUHP).
- d. Delik dengan *previlage* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP).
- f. Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

d. Teori-Teori Pidanaaan

Pada umumnya teori pidanaaan tidak dirumuskan dalam perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan djatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya oleh pembuat (prevensi khusus) maupun penceghn yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).

Tujuan pengenaan pidana di dalam KUHP peninggalan colonial Belanda yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara eksplisit, namun demikian rancangan KUHP tahun 2012 telah merumuskan secara eksplisit tujuan peminadaan yang terdapat dalam Pasal 52 yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP sendiri menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tujuan pidana yang diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan berikutnya, untuk perbaikan terhadap diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha menakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan.¹⁰ Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- d. Pengimbalan/pengimbangan.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhannya penderitaannya berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara)

¹⁰ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) hal. 60.

¹¹ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*. Cet.7. hal. 157-161

yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Menurut mereka yang menganut paham “*retributif*” seperti yang ditulis oleh Herbert L. Packer, memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik oleh karena setiap orang yang melakukan suatu tindakan, harus mempertanggung jawabkan tindakannya dan harus menerima ganjarannya sesuai tindakan yang dilakukan.¹²

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam;
3. dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut :

1) pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini.

2) Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant. Pandangan Kant menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan merupakan syarat etika. Pemerintahan negara mempunyai hak untuk

¹² C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia), hal. 78.

menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.

3) Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel. Hegel ini dikenal dengan teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pemikiran yang demikian, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*).

4) Pandangan Aesthetica dari Herbart

Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

5) Pandangan dari Heymans

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans didasarkan pada niat pelaku. Ia menyatakan bahwa “setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil. Menurut Leo Polak¹³ pandangan Heymans ini tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat pencegahan (*preventif*). Teori ini bukan suatu teori pembalasan sepenuhnya.

6) Pandangan dari Kranenburg

¹³ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 161*

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan
2. Pencegahan khusus (*special preventive*).

Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Sedangkan teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang 25 yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.¹⁴

¹⁴ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 161-165*

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van Hamel Dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis;
- 3) Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

a. Teori Gabungan yang Pertama

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari

¹⁵ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana. Cet.7. hal. 166-168*

kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

b. Teori Gabungan yang Kedua

Menurut Simons dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat penjahat tidak berdaya.

Menurut Vos yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhannya secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhannya pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara

pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹⁶ Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

Menurut Arimbi Heroepoetri, *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis. Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

a. Umur;

¹⁶ <http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 10 Nov 2016, pukul 15.30 Wita.

¹⁷ <http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada tanggal 10 Nov 2016, pukul 15.30 Wita.

- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.¹⁸

Manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial memerlukan manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi sosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan-benturan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

¹⁸ Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010, hal.11.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

¹⁹ Adi Sujatno *Negara Tanpa Penjara* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), hal.12.

- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i) Mendapat pengurangan masa pidana.
- j) Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapat pembebasan bersyarat.
- l) Mendapat cuti menjelang bebas.
- m) Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :²⁰

a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

²⁰ Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 2-33

- 1) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
- 2) Pemberian perlengkapan pakaian, dan
- 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik pemsyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas

kepolisihan, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

e. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan

kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemsyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan dilarang membawa pesawat televise dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemsyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

- a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
- b. Mengeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemsayarakatan

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:²¹

- 1) Berkelakuan baik; dan
- 2) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:²²

- 1) berkelakuan baik;
- 2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi;
- 3) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik ;
- 4) telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
- 5) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- 6) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34-34A.

7) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Adapun remisi yang diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan melalui keputusan menteri. Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1996 (Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *Rules For*

The Treatment Of Prisoner 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana).

C. Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitif*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.²³

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat

²³ Dwidya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3* (Bandung: Refika Aditama). hal. 133

²⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang remisi.

yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁵ Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salahsatu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali kemasyarakat melalui reintegrasi yang sehat.²⁶

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekantingkat frustasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian,perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad bagiwarga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan

²⁵ Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6)

²⁶ Dwidya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Cet.3. hal. 143

memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.

Hukum Islam sendiri membahas dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqaarah ayat 178 yaitu²⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

²⁷ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h.107.

Qishaash ialah pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya.²⁸ Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum -hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi di artikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisadijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Bagi narapidana kebanyakan, hak remisi merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Namun demikian hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan di kalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan

²⁸ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, h.106.

Remisi Tambahan salah satu syaratnya adalah “melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas”. Untuk syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi khususnya remisi tambahan, agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan narapidana dan kecurigaan masyarakat, perlu adanya optimalisasi lembaga pengawasan mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan setempat yang juga melibatkan Hakim Wasmat dengan menitik beratkan pengawasannya pada hak-hak narapidana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas :

a. Remisi Umum

Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ; dan

b. Remisi khusus

Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang di pilih adalah hari besar yang paling di muliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

c. Remisi Tambahan

Merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

- 1) Berbuat jasa kepada negara;
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga Pemasyarakatan.

d. Remisi Dasawarsa

Merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak Pidaana bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

e. Remisi Khusus Yang Tertunda

Merupakan remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. Pemberian remisi ini adalah untuk meringankan masa pidana atau hukuman bagi narapidana yang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan telah menunjukkan perbuatan baik di Lembaga Pemasyarakatan namun pengajuan tersebut tertunda karena dalam waktu 6 (enam) bulan setelah statusnya sebagai narapidana belum di perolehnya karena masih menunggu status hukumnya dalam proses peradilan sehingga dengan demikian turunnya surat keputusan tentang remisi bagi narapidana yang bersangkutan juga terlambat daan pengajuan remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukan setelah tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini diberikan agar narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan mempunyai hak yang sama sebagaimana narapidana yang lainnya.

f. Remisi Khusus Bersyarat

Merupakan remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya keagamaannya berlangsung namun masa pidana yang telah dijalannya belum cukup 6 (enam)

bulan. Namun pemberian remisi ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu yang disyaratkan ternyata narapidana atau anak pidana yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan ke dalam register F.

3. Syarat Pemberian Remisi

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan.²⁹

Sementara Prosedur pengajuan remisi secara administratif : Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri, Surat Penahanan dari Kepolisian, Kartu pembinaan, Daftar perubahan ekspirasi Tidak mempunyai

²⁹Pasal 34 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan M0 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila Narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat di batalkan. Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang :³⁰

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

³⁰ Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive life) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.³¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan

³¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Jakarta: Prenada Media Group)*, hal.126

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.³²

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa³³ :

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisisan, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan, menurut Muladi, tujuan pemidanaan Pencegahan (umum dan khusus) masyarakat, memelihara solidaritas, adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana, hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas pengimbalan/perimbangan.

2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai

³² C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. hal. 128

³³ Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia edisi kedua*. Cet.II. hal. 167

anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat. Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut : melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga permasayarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.

³⁴ keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Penerapan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan di Indonesia sejak konsepsi perbaharuan diluahkan didalam piagam pemasyarakatan Indonesia pada tanggal 27 april 1964 di Jakarta yang merupakan amanat dari presiden, yang dalam point satu menyebutkan, bahwa apa yang dulu dimaksudkan kepenjaraan telah di *re tool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan. Tetapi peraturan yang digunakan adalah reglement penjara 1917 warisan kolonial dengan sistem kepenjaraan yang masih berasaskan pada pembalasan, padahal perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pidana penjara dalam arti perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menganut suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang lebih dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Konsep tentang

pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Suhardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu). Hal tersebut terungkap dalam orasinya yang berjudul *Pohon Beringin Pengayoman*, yang diucapkan pada upacara penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal Juli 1963. Dalam orasinya itu, Suhardjo, antara lain mengemukakan konsep tentang hukum nasional dan konsep tentang perlakuan terhadap narapidana.

Menyangkut perlakuan terhadap narapidana, Suhardjo menyatakan:³⁵

“Dibawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan : disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.”

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana di Indonesia. Yaitu perubahan nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahirnya pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia. Selanjutnya sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jederal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah rumuskan

³⁵ Suhardjo *Pohon Beringin Pengayoman*, (Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin). hal. 21

dalam konfrensi lembaga tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan, terdiri dari:³⁶

- 1) Orang yang tersesat terus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana adalah buikan tindakan balas dendam dari negara
- 3) Rasa tobat tindaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan membimbing
- 4) Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk membangun negara
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu itu penjahat
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaaan
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan hambatan sistem pemasyarakatan.

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi untuk mengenal pembedaan.³⁷

³⁶ Dwidya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3.hal. 98*

³⁷ Dwidya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3. hal. 103*

Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab, maka pada tahun 1990 Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang intinya menetapkan antara lain :

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
- 2) Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- 3) Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis
- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.

Sedangkan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperang teguh pada asas berlaku, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diantaranya :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Konsep pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana, kini telah mendapatkan pengaturannya dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang

diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan ;

Pasal 1 angka 1

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Anak pemasyarakatan terdiri atas anak pidana, anak negara dan anak sipil, sedangkan klien pemasyarakatan adalah mereka yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Pasal 1 angka 5, angka 8, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

LAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sehingga petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan benar-benar berkualitas dan mampu mengemban tugas tersebut karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mereka disebut dengan nama Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta

merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁸

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, abik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³⁹

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan kepribadiannya, amnesia dengan sesame, dan manusia dengan lingkungan. Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴⁰ Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka terpenting dalam sistem pemasyarakatan ini adalah pola pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,

³⁸ Dwidya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3. hal. 103*

³⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁴⁰ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat. Pembinaan di LAPAS dilakukan melalui 3 Tahap yakni : (1) tahap awal; (2) tahap lanjutan; (3) tahap akhir yang dapat diuraikan sebagai berikut :⁴¹

- 1) Pembinaan tahap awal narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana
- 2) Pembinaan tahap lanjutan meliputi :
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana.
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- 3) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhir tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Masa Pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan;
- b. Perancangan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. Perancangan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud meliputi:

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, pasal 9.

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam tahap-tahap pembinaan seperti diuraikan diatas selalu ditetapkan melalui siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa pidana Warga binaan pemasyarakatan yang disesuaikan dengan tahap-tahap pembinaan yang ada.

Dalam tahap pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan di LAPAS merupakan hak-hak yang warga binaan yang wajib diperoleh agar kelak pada masa integrasi warga binaan pemasyarakatan dapat beradaptasi dalam pembangunan serta tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Clemens Bartolas menyatakan ada tiga asumsi dasar diperlukannya model reintegrasi, pertama : bahwa permasalahan menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat dimana mereka berasal, kedua : masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggaran hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan, sedangkan asumsi yang ketiga : bahwa kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri.

E. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan

dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Maritain dalam bukunya yang berjudul *Human Rights and Natural Law* mengemukakan konsepsi sosial harus dibangun berdasarkan empat ciri khas utama sebagai berikut:⁴²

- a. Personal, artinya masyarakat adalah suatu kesatuan yang terdiri dari orang-orang (*persons*) yang bermartabat;
- b. Komunal, artinya secara alami orang cenderung kepada suatu masyarakat (*community*) yang harus menganggap kebaikan bersama lebih agung dari pada kebaikan individu yang syaratnya tidak dapat membenarkan pelanggaran hak-hak dari masing-masing orang;
- c. Pluralis, artinya martabat dari pribadi manusia hanya dapat dikembangkan kedalam suatu pluralitas dari masyarakat yang otonom besar.
- d. Theis, artinya dalam setiap anggota masyarakat harus percaya kepada Tuhan yang menjadi prinsip dan tujuan pribadi manusia juga sumber utama dari hukum alami. Dalam artian Tuhan dapat dikatakan sebagai sumber utama dari masyarakat dan wewenang politik di kalangan manusia.

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Siapapun manusia yang berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk

⁴² Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada). hal. 11

dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak ada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.⁴³

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam sebagai berikut:⁴⁴

a. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut.

1. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
2. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
3. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
4. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

b. Hak Asasi Politik/Political Rights

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut.

⁴³ Majda El-muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 47

⁴⁴ Fadli Andi Natsif, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Makassar: Bahan Power Point Kuliah), hal. 4-6

1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
3. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
4. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

c. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights

Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut.

1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
3. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak Asasi Ekonomi/Property Rights

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut.

1. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
4. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
5. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut.

1. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
2. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

f. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut.

1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
2. Hak mendapatkan pengajaran.
3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

2. HAM Perspektif Barat

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.⁴⁵

Semua ini muncul sebagai ungkapan keinginan menyatukan manusia dan hak-hak asasi manusia dalam masyarakat internasional yang merasakan akibat

⁴⁵ Majda El-muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. hal. 51

buruk peperangan. Sebelumnya dunia barat sangat tidak peduli dengan HAM sampai membuat mereka terbelakang dan mundur sekali. Sampai pada 15 Juni 1215M muncullah piagam MAGNA CHARTA ⁴⁶dimasa kesewenangan raja inggris yang bernama John Lackland. Waktu itu para bangsawan merasa tidak puas dan berhasil memaksa raja John untuk menandatangani perjanjian yang mereka namakan Magna Charta atau Piagam Agung.

Namun piagam ini hanya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.”⁴⁷

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu

⁴⁶ Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM (Malang, Jatim: Setara Press)*. hal. 7

⁴⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, edisi kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)*. hal. 11

memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson. Presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :⁴⁸

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).
2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion)
3. Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear)
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).

Sedangkan perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :⁴⁹

1. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
2. Manusia mempunyai hak yang sama.
3. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
4. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
5. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8. Adanya kemerdekaan surat kabar.
9. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.

⁴⁸ Majda El-muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. hal. 51

⁴⁹ Dr. Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hal. 14.

10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
12. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13. Adanya kemerdekaan hak milik.
14. Adanya kemerdekaan lalu lintas.
15. Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

Sebagai sebuah proses dialektika, pemikiran HAM akhirnya memasuki tahap penyempurnaan sampai munculnya generasi HAM keempat yang mengkritik peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Munculnya generasi keempat HAM ini dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan *Declaration Of The Basic Duties Of Asia People And Government*.

3. HAM Perspektif Islam

Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Kitab-kitab Suci, seperti Zabur, Taurat, Injil, dan al-Qur'an, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.

Dalam hubungan dengan HAM, dari ajaran pokok tentang *hablum min Allah* dan *hablum min na-nas*, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia (*haq al -insan*) dan *hak Allah*.⁵⁰ Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan

⁵⁰ Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM*. hal. 9

manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syari'at-Nya sebagai tolok ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara.

Oleh karena itu, konsep Islam tentang HAM berpijak pada Tauhid, yang pada dasarnya di dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide *perkemaklukan*.⁵¹ Ide *perikemakhlukan* memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide *perikemakhlukan* mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar. Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi manusia, yaitu:

1. Hak darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati.
2. Hak hajy (hak sekunder), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.
3. Hak tahsiny, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Dengan demikian, HAM dalam Islam lebih dulu muncul. Tepatnya, *Magna Charta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Di samping nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM itu ada dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, juga terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam. Tonggak

⁵¹ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. hal. 16.

sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo.

Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; dan hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip: ⁵²

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
3. Membela mereka yang teraniaya;
4. Saling menasehati;
5. Menghormati kebebasan beragama.

Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama, yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya, yang dalam perspektif Islam disebut “nilai ketaqwaannya”. Apalagi, manusia diciptakan untuk merepresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi, sudah barang tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan HAM.

⁵² Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM*. hal. 12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research*, *Field research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan oleh hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan dapat membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis melihat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait dengan pemberian remisi diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Serta Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

2. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengamati sejauhmana implementasi ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dengan cara interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung lapangan dengan mengadakan wawancara kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana khusus.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹ Dalam hal ini hal ini penulis mewawancarai Petugas dan beberapa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.² Dalam hal ini hal ini penulis melakukan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³ Dalam hal ini hal ini penulis melakukan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian sebagai berikut.

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku Catatan dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen adalah alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

¹ Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*(Cet v, Jakarta: PT BumiAksara, 2004), hal.58

²Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, hal. 54

³Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, hal.73

3. Kamera

Kamera adalah alat yang berfungsi untuk memotret dan merekam segala bentuk kegiatan peneliti selama melakukan pembicaraan dan informan.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi Data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Penulis dalam hal ini melakukan analisis yang dapat menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data terkait efektifitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.

3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan .

Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lapas Klas I Makassar

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.¹

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹ Dwidya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3. hal. 80*

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,

sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.² Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam

² Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia edisi kedua. Cet.II. hal. 167*

pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan Klas I Makassar memiliki luas tanah 94.069 m² yang status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m².

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu :

VISI :

1. Terwujudnya Lapas Klas 1 Makassar
2. Tangguh dalam pembinaan
3. Prima dalam pelayanan
4. Unggul dalam pengamanan

MISI :

Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.

Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana)terhukum.³ Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Arimbi Heroepoetri, *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.⁴

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan

³ www.kbbi.web.id/narapidana. diakses pada pukul 15:30 wita tanggal 4 Juni 2017.

⁴ C. Djisman Samosir, SH., MH., *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. hal.

masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (treatment approach) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni: ⁵

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

⁵ Dwidya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3 (Bandung: Refika Aditama). hal. 120*

- i. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehalibitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:⁶

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i) Mendapat pengurangan masa pidana.
- j) Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapat pembebasan bersyarat.
- l) Mendapat cuti menjelang bebas.
- m) Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1

Pengurangan masa pidana atau remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitif*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.⁷ Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran.

Pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pemidanaan dimana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah di re tool dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan.

⁷ Dwidya Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3* (Bandung: Refika Aditama). hal. 133

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal Ramadhani mengatakan bahwa “hak – hak narapidana diberikan telah sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, terutama hak remisi bagi narapidana.”⁸

Hak remisi telah diberikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini setiap narapidana berhak mendapatkan hak remisi apabila narapidana telah memenuhi syarat – syarat untuk mendapatkan remisi. Dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan masih memuat ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu remisi diberikan kepada narapidana dan anak

⁸ Faizal Ramadhani, Wawancara, Staf Data Base Seksi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 9 Mei 2017.

pidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang merupakan salah satu syarat dalam pemberian remisi tentu harus memenuhi beberapa indikator. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Dalam beberapa kasus misalnya ada tahanan yang dikategorikan berkelakuan baik karena selama di tahanan rajin beribadah dan tidak melakukan pelanggaran. Sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Faisal Ramadhani menyatakan bahwa⁹ :

“Tolok ukur bahwa seseorang narapidana telah berkelakuan baik adalah tidak memiliki atau mempergunakan alat komunikasi yang tidak diizinkan oleh petugas Lapas, senjata tajam, senjata api, narkoba, minuman keras. Tidak ada percobaan untuk melarikan diri, tidak melakukan provokasi yang mengakibatkan perkelahian, tidak melakukan pengrusakan”

Namun Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menambahkan ketentuan bahwa persyaratan berkelakuan baik harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Sementara itu pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi ketentuan pasal 34

⁹ Faizal Ramadhani, Wawancara, Staf Data Base Seksi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 9 Mei 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga harus memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis untuk Narapidana Warga Negara Asing.¹⁰

Bagi Narapidana Narkoba, pemberian remisi hanya berlaku untuk Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,” bunyi Pasal 34A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.¹¹ ”Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Remisi diberikan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait (tadinya hanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).” Pasal 34C Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini juga menegaskan, Menteri Kehakiman dapat memberikan Remisi kepada Anak Narapidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terkait terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika,

¹⁰ Bakri, Wawancara, Kepala Sub. Bagian Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 10 Mei 2017.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34A ayat 2.

korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau menderita sakit berkepanjangan.”¹²

Sedangkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, untuk pelaksanaan pemberian remisi tentunya ada sebuah prosedur yang harus dilakukan dan adanya kesinambungan antara Pembina dan yang dibina agar remisi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sedangkan mengenai prosedurnya yaitu dimulai dari tim pengawas atau tim penilai dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, yang kemudian diajukan ke kepala lembaga pemasyarakatnya. Yang dinilai dari tim pengawas adalah “apakah narapidana sudah menjalani masa pidananya dengan berkelakuan baik, sehingga dari pihak pengawas atau tim penilai kemudian mengajukan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan” Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bekerjanya hokum mengenai Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dikaitkan dengan teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman, maka faktor – faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai realisasi kebijakan Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Beberapa peraturan perundang – undangan yang telah dihasilkan oleh lembaga pembuat peraturan terkait dengan pelaksanaan pemberian remisi, antara lain:
 - 1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

¹²Bakri, Wawancara, Kepala Sub. Bagian Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 10 Mei 2017.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 5) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
 - 6) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02-01. Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
 - 7) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Setiap sistem hukum (baca undang – undang dan peraturan yang disebutkan pada point a) mempengaruhi, mendorong, atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan perundang – undangan dan lembaga kekuasaan Negara.
 - c. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan– tuntutan yang diajukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia, dan direktorat jenderal pemasyarakatan kepada Lembaga Pembuat Hukum yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
 - d. Kemudian oleh kekuasaan Negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong dilakukannya tingkah laku yang dilakukan oleh pemegang peran (role occupant) yaitu anak pidana dan narapidana.

- e. Bagaimana respon pemegang peran terhadap pemberian remisi yang ditujukan terhadap dirinya yang berupa pengurangan masa pidana.
- f. Tingkah laku seorang pemegang peran merupakan hasil dari seluruh tingkah laku yang telah dilakukan oleh pemegang peran secara personal atau individu.
- g. Keadaan ini juga berlaku bagi lembaga pembuat peraturan dan penerap sanksi. Kedua lembaga ini juga mendapat pengaruh dari kekuatan personal dan sosial. Jadi pengaruh penegak hukum sebagai suatu lembaga yang tidak dapat dielakkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat khususnya dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar adalah:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang – undangannya),
- b. Penegakkannya (para pihak dan pemerintah),
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis empiris (menyangkut pertimbangan perilaku anak pidana dan narapidana)

Dalam pemberian remisi kepada narapidana harus mengikuti prosedur yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Menurut hasil wawancara dari narasumber penelitian, dikatakan bahwa “jika narapidana sudah memenuhi syarat – syarat untuk mendapatkan remisi maka Lembaga Pemasyarakatan akan mengusulkan ke Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia kota Makassar”¹³ Persyaratan agar dapat mengajukan Remisi adalah sebagai berikut:

1. Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi apabila:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi dapat pula diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS

2. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.¹⁴

Pada peraturan pemerintah yang baru terdapat beberapa perubahan syarat – syarat pemberian remisi kepada narapidana. Adapun perubahan syarat – syarat agar dapat mengajukan remisi pada pasal 34 adalah sebagai berikut:

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi;
2. Remisi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dibuktikan dengan:

¹³ Faizal Ramadhani, Wawancara, Staf Data Base Seksi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 9 Mei 2017

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34.

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Untuk pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesediaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing
 Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
3. Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Prosedur untuk mengajukan remisi adalah sebagai berikut:

a. Remisi Umum:

1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang – Undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara,

atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
3. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang – undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

b. Remisi Susulan:

1. Remisi Susulan hanya diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang belum pernah menerima remisi.
2. Pengusulan Remisi Susulan dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara.
3. Pengusulan Remisi Khusus dilakukan dengan mengisi formulir Remisi Umum Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
4. Usulan Remisi Susulan tersebut kemudian dibuatkan keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Keputusan Kantor Wilayah tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
6. Remisi Susulan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk lebih jelasnya diterangkan sebagai berikut:

a. Pemberian Remisi Umum

Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang dinilai berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun ketentuan lain yang diatur dalam pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan yang pada saat sekarang ini isi pasalnya terdapat perubahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan dipergunakan dalam pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yakni telah menjalani $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) masa pidana bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Psikotropika. Hak warga binaan ini diberikan setiap hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan besarnya remisi umum yang diberikan tergantung lamanya warga binaan dalam menjalani masa pidananya. Pemberian remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
 - a. 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
 - b. 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua belas) bulan atau lebih.
2. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
3. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.

4. Pada tahun keempat dan kelima masing – masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Untuk menghitung lamanya 1 (satu) bulan remisi adalah 30 hari. Dalam pemberian remisi umum kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dibagi lagi menjadi remisi umum sebagian dan remisi umum seluruhnya, dimana remisi umum sebagian adalah remisi yang diberikan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan namun ia tetap masih menjalankan sisa pidananya, sedangkan remisi umum seluruhnya adalah pemberian remisi dimana banyaknya remisi yang diterima warga binaan menyelesaikan masa pidananya sehingga ia langsung bebas.

Pengusulan untuk mendapatkan remisi umum dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selambat – lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.U.I untuk remisi umum sebagian/pengurangan masa pidana dan formulir R.U.II untuk remisi seluruhnya/pengurangan masa pidana sekaligus pembebasan. Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lalu diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan

yang kemudian diumumkan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

TABEL 1

Selama periode tahun 2016 jumlah daftar usulan narapidana yang mendapatkan remisi umum 17 agustus 2016 berjumlah :

Jumlah Penghuni Lapas	Jumlah Usulan Remisi		Jumlah	Keterangan
	RU I	RU II		
1104	573	8	581	RU I : Remisi Umum Sebagian/ pengurangan masa pidana RU II : Remisi Umum Seluruhnya/pengurangan masa pidana dan pembebasan.

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Tabel 1 menunjukan mengenai Jumlah narapidana yang diberikan remisi pada periode Tahun 2016 mengenai pengusulan remisi Umum 17 agustus yang diusulkan (581) narapidana yang (573) RU I (Remisi Umum), (8) orang RU II.

Apabila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi umum ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali pada tahun berikutnya untuk mendapatkan remisi. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.B.I untuk remisi umum sebagian/pengurangan masa pidana dan formulir R.B.II untuk remisi seluruhnya/pengurangan masa pidana dan pembebasan.

Tabel 1 menunjukan Daftar Usulan mengenai Pengusulan Remisi Umum 17 Agustus 2016 telah mendapatkan putusan dari pengadilan maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka dapat dipaparkan ada :

- 1) 150 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 1 Bulan (RU I)
- 2) 145 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 2 Bulan (RU I)
- 3) 135 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 3 Bulan (RU I)
- 4) 48 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 4 Bulan (RU I)
- 5) 66 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 5 Bulan (RU I)
- 6) 29 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 6 Bulan (RU I)
- 7) 2 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 1 Bulan (RU II)
- 8) 3 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 2 Bulan (RU II)
- 9) 1 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 3 Bulan (RU II)
- 10) 2 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 5 Bulan (RU II)

TABEL 2

Selama periode tahun 2016 jumlah daftar narapidana khusus yang mendapatkan remisi umum 17 agustus 2016 berjumlah

Jumlah Penghuni Lapas	Jumlah Usulan Remisi		Jumlah	Keterangan
	RU I	RU II		
1104	30	2	32	RU I : Remisi Umum Sebagian/ pengurangan masa pidana RU II : Remisi Umum Seluruhnya/pengurangan masa pidana dan

				pembebasan.
--	--	--	--	-------------

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Tabel 2 menunjukkan mengenai Jumlah narapidana khusus yang diberikan remisi umum pada periode Tahun 2016 yaitu mengenai pengusulan remisi Umum 17 agustus yang diusulkan (32) narapidana khusus yang (30) RU I (Remisi Umum), (2) orang RU II.

Apabila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi umum ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali pada tahun berikutnya untuk mendapatkan remisi. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.B.I untuk remisi umum sebagian/pengurangan masa pidana dan formulir R.B.II untuk remisi seluruhnya/pengurangan masa pidana dan pembebasan.

Tabel 2 menunjukkan Daftar Usulan mengenai Pengusulan Remisi Umum 17 Agustus 2016 bagi narapidana khusus telah mendapatkan putusan dari pengadilan maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka dapat dipaparkan ada :

- 1) 12 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 3 Bulan (RU I)
- 2) 10 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 4 Bulan (RU I)
- 3) 8 Orang yang mendapatkan remisi sebanyak 6 Bulan (RU I)
- 4) 2 Orang yang mendapatkan remisi umum seluruhnya (RU II)

b. Pemberian Remisi Khusus

Remisi Khusus diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bertepatan dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh warga binaan yang bersangkutan. Dengan ketentuan bahwa bila dalam satu tahun ada lebih dari satu hari besar keagamaan, maka yang dipilih adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
 - a. 15 (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
 - b. 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih.
- 3) Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali. Pengusulan remisi khusus menggunakan formulir R.K.I untuk remisi khusus sebagian dan formulir R.K.II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. Untuk pengajuan usul mendapatkan remisi khusus sama dengan remisi umum yakni dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selambat – lambatnnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir R.K. Setelah pengusulan

remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lalu diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun pemberian remisinya diberikan pada saat, sebagai berikut:

- 1) Setiap hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
- 2) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak pidana yang beragama Kristen.
- 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
- 4) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.

TABEL 3

Selama periode tahun 2016 jumlah daftar usulan narapidana yang mendapatkan remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri berjumlah :

Jumlah Penghuni Lapas	Jumlah Usulan Remisi		Jumlah	Keterangan
	RK I	RK II		
1090	515	4	519	<p>RK I : Remisi Khusus Sebagian/ pengurangan masa pidana</p> <p>RK II : Remisi Khusus Seluruhnya/pengurangan masa pidana dan</p>

				pembebasan.
--	--	--	--	-------------

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Apabila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir R.K.T. (Remisi Khusus Tertunda).

Tabel 3 mengenai Pengusulan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 terhadap Narapidana Pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar dapat dianalisis bahwa (519) Orang narapidana yang diusulkan untuk diberikan remisi yang terbagi menjadi (515) orang yang dikenai pidana sebanyak 1 (satu) tahun (R.K.I), (4) orang yang merupakan terpidana yang telah menjalani pidana lebih dari 1 (satu) tahun (R.K.II).

Tabel 3 menunjukan Hasil Putusan Pengadilan maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Putusan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 terhadap Narapidana Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar yang terdiri dari:

- 1) 131 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 15 hari (RK I)
- 2) 203 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 1 Bulan (RK I)
- 3) 100 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 1 Bulan 15 hari (RK I)
- 4) 81 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 2 Bulan (RK I)
- 5) 3 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 1 Bulan (RK II)
- 6) 1 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 2 Bulan (RK II)

TABEL 4

Selama periode tahun 2016 jumlah daftar usulan narapidana khusus yang mendapatkan remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri berjumlah :

Jumlah Penghuni Lapas	Jumlah Usulan Remisi		Jumlah	Keterangan
	RK I	RK II		
1090	35	-	35	<p>RK I : Remisi Khusus Sebagian/ pengurangan masa pidana</p> <p>RK II : Remisi Khusus Seluruhnya/pengurangan masa pidana dan pembebasan.</p>

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Apabila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir R.K.T. (Remisi Khusus Tertunda).

Tabel 4 mengenai Pengusulan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 terhadap Narapidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar dapat dianalisis bahwa (35) Orang narapidana yang diusulkan untuk diberikan remisi dan (35) orang yang dikenai pidana sebanyak 1 (satu) tahun (R.K.I),

Tabel 4 menunjukan Hasil Putusan Pengadilan maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Putusan Remisi Khusus Hari Raya Idul

Fitri Tahun 2016 terhadap Narapidana Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar yang terdiri dari:

- 1) 8 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 15 hari (RK I)
- 2) 15 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 1 Bulan (RK I)
- 3) 12 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 1 Bulan 15 hari (RK I)

TABEL 5

Selama periode tahun 2016 jumlah daftar usulan narapidana yang mendapatkan remisi Khusus Hari Raya Natal berjumlah :

Jumlah Penghuni Lapas	Jumlah Usulan Remisi		Jumlah	Keterangan
	RK I	RK II		
1082	30	-	30	RK I : Remisi Khusus Sebagian/ pengurangan masa pidana RU II : Remisi Khusus Seluruhnya/pengurangan masa pidana dan pembebasan.

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Pelaksanaan remisi Hari Raya Natal sama halnya seperti pemberian saat Hari Raya Idul Fitri, apabila dalam pelaksanaannya narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir R.K.T. (Remisi Khusus Tertunda).

Tabel 5 mengenai Pengusulan Remisi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2016 terhadap Narapidana Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar dapat dianalisis bahwa (30) Orang narapidana yang diusulkan untuk diberikan remisi yang terbagi menjadi (30) orang yang dikenai pidana sebanyak 1 Tahun (RK I).

Tabel 5 menunjukan Hasil Putusan Pengadilan maupun Kemenkumham atas Putusan Remisi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2016 terhadap Narapidana Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar yang terdiri dari:

- 1) 10 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 15 (lima belas) hari (RK I)
- 2) 14 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 1 (satu) Bulan (RK I)
- 3) 6 Orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus 1 (satu) Bulan 15 hari (RK I)

Dari hasil penelitian tampak bahwa berdasarkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di atas adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN 02.10 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Perbedaan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana umum dan Khusus hanya terletak pada proses pengusulannya saja, bagi narapidana khusus syarat yang harus dipenuhi untuk diusulkan mendapatkan remisi yaitu telah melaksanakan amanat dalam Pasal 34 dan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁵

Adanya peraturan itu, maka yang perlu dicatat adalah bahwa sistem pemasyarakatan semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan peraturan tersebut cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan atau pedoman dalam pelaksanaan pemberian remisi.

¹⁵ Laludi, Wawancara, Kepala Sub. Bagian Kegiatan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 15 Mei 2017

Dalam pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan, sebagai faktor ikut mendukung akan keberhasilannya adalah peran serta masyarakat dan para penegak hukum baik di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri maupun di luar lembaga pemasyarakatan, sehingga ikut membina terpidana dan tidak diskriminatif dalam memberikan remisi.

Remisi merupakan langkah awal bagi terpidana untuk kembali kemasyarakatan untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat ikut serta dalam pembangunan Negara.

Dari hasil wawancara dengan Faizal Ramadani di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar mengemukakan bahwa “ untuk mendapatkan hak – hak mereka seperti remisi maupun hak – hak lainnya harus menjalankan proses pembinaan, dimana narapidana harus mematuhi peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk hak – hak narapidana itu sendiri pada dasarnya telah disampaikan baik secara tertulis maupun lisan contohnya melalui papan informasi maupun tata tertib peraturan yang ada sebagai informasi bahwa hak – hak mereka tetap ada meskipun sebagai narapidana. Akan tetapi konsekuensi dasar untuk mendapatkan hak – hak mereka juga harus berjalan harmonis dan seimbang dengan norma yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan informasi tersebut mengenai hak – hak mereka juga sering kami sampaikan sebagai petugas maupun sebagai Pembina pemasyaraktan agar berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Supaya Hak mereka bisa didapatkan sepenuhnya. Untuk hak remisi juga telah kami berikan sesuai dengan Undang – undang yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan adanya kendala internal maupun eksternal yang terjadi di lapangan baik dari prosedur, sarana dan prasarana, budaya cultural dan

narapidana itu sendiri. Karena untuk mendapatkan remisi narapidana harus memenuhi peraturan baik substantif maupun administratifnya.¹⁶

Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar telah memiliki Upaya internal dan eksternal dalam penanganan kendala tersebut bekerja sama dengan pihak - pihak yang terkait dalam pemberian remisi, sehingga dalam pemberian remisi dalam setiap pengusulan dan pelaksanaannya meminimalisirkan kendala dari berbagai kemungkinan yang ada bahkan menghilangkan kendala¹⁷

B. Efektifitas Pemberian Remisi di Lapas Klas I Makassar

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemberian remisi.

Pelaksanaan Pemberian remisi tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan juga dari beberapa orang narapidana.

Wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar “Bapak Laludi, S.Sos” mengatakan bahwa kendala yang terjadi adalah :¹⁸

1) Proses pengusulan untuk memperoleh remisi bagi narapidana, masih ada belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan

¹⁶ Faizal Ramadhani, Wawancara, Staf Data Base Seksi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 9 Mei 2017.

¹⁷ Laludi, Wawancara, Kepala Sub. Bagian Kegiatan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 15 Mei 2017

¹⁸ Laludi, Wawancara, Kepala Sub. Bagian Kegiatan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 15 Mei 2017.

perundang – undangan yang berlaku. Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian remisi pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama;

2) Tidak konsistennya para penegak hukum dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian remisi

3) Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing – masing, sehingga sering terjadi keterlambatan putusan dan eksekusi pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana.

Bapak Bakri, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Registrasi “ mengatakan bahwa kendala yang terjadi adalah :¹⁹

- 1) Kendala pada narapidana itu sendiri yang melakukan tindakan yang tidak disiplin seperti, berkelahi, menggunakan alat telekomunikasi dan pelanggaran disiplin lainnya.
- 2) Remisi yang telah diajukan dibatalkan karena narapidana melakukan kesalahan atau perkelahian atau register F, sehingga remisi yang telah di ajukan dibatalkan.

Bapak Faizal Ramadhani selaku Staf Data Base Seksi Registrasi “mengatakan bahwa kendala yang terjadi dalam pemberian remisi adalah :”²⁰

- 1) Narapidana atau anak pidana melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- 2) Proses di Direktorat lama.

Adapun beberapa tanggapan dari hasil wawancara dengan narapidana

Abd. Karim selaku narapidana tindak pidana pemerkosaan mengatakan bahwa “kendala yang terjadi selama menunggu mendapatkan remisi adalah jika

¹⁹ Bakri, Wawancara, Kepala Sub. Bagian Register, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 15 Mei 2017.

²⁰ Faizal Ramadhani, Wawancara, Staf Data Base Seksi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 9 Mei 2017

melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka hak mendapatkan remisi akan dibatalkan. Padahal perkelahian terkadang muncul bukan dari kita, melainkan dari narapidana lain. Itulah yang menjadi kendala untuk bisa menjalankan peraturan yang ada.²¹

Sugeng Hermawan selaku narapidana tindak pidana Korupsi mengatakan bahwa kendala yang terjadi selama ini terkait pemberian remisi yaitu dari segi aturannya, kami harus membayar denda terlebih dahulu, kemudian nanti setelah menjalani waktu penjara 6 bulan baru diberikan remisi, hal ini tidak sama dengan apa yang di berikan kepada narapidana lain, seakan-akan kami didiskriminasi dengan aturan yang berlaku saat ini.²²

Herman selaku narapidana tindak pidana Terorisme mengatakan bahwa “kendala yang dialami dalam mendapatkan remisi adalah apabila melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan maka haknya mendapatkan remisi akan dibatalkan dan dalam lama prosesnya.”²³

Dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor kendala tersebut dikaitkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain²⁴:

- a. Faktor hukum itu sendiri yaitu peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah itu sendiri, karena dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang remisi masih adanya

²¹ Abd Karim, Wawancara, Narapidana Tindak Pidana Pemerkosaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 15 Mei 2017.

²² Sugeng Hermawan, Wawancara, Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 15 Mei 2017.

²³ Herman, Wawancara, Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 15 Mei 2017.

²⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hal 11-59.

ketidakjelasan dalam kata – kata yang dipergunakan dalam setiap perumusan pasal – pasal tersebut, sehingga hal tersebut terjadi penafsiran yang sangat luas.

- b. Faktor penegak hukumnya. Penegak hukum merupakan pemegang peranan (*role occupant*). Pemegang peranan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian remisi adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia kota Makassar, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan, namun tidak dipungkiri bahwa berbagai kedudukan dan peranan timbul adanya suatu konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*) sehingga dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang dilakukannya. Dalam pelaksanaan pemberian remisi yaitu peranan penegak hukum yang belum dilaksanakannya secara optimal yaitu terjadi keterlambatan pemberian putusan/penyerahan eksekusi dari penegak hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam putusan remisi kepada narapidana sering terlambat dan ada beberapa narapidana tidak mendapatkan remisi karena keterlambatan putusan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas. Dalam hal ini kendalanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang potensial dalam penerapan deskripsi pekerjaan. Dalam hal ini sebagai petugas lembaga pemasyarakatan sebagian besar tidak memahami bidang yang ditugaskan bagi pegawai tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dasar hukum.
- d. Faktor masyarakat. Masyarakat kurang menyadari dan kurang memahani apa itu hukum. Karena kurangnya kesadaran hukum itu, banyak masyarakat yang

tidak mengacuhkan hukum, pura – pura menaati hukum, dan secara terang – terangan melanggar peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembuat peraturan dan yang telah diterapkan oleh penerap peraturan (penegak hukum). Sehingga masyarakat hanya mematuhi hukum pada saat ada penegak hukumnya saja karena penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

- e. Faktor kebudayaan. Kurangnya mengutamakan nilai ketertiban dalam ruang lingkup masyarakat dan lingkungan lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Untuk mengatasi kendala dalam pemberian remisi, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar memiliki upaya yaitu menjalankan secara optimal peraturan perundang – undangan mengenai hak narapidana untuk mendapatkan remisi, dan memberdayakan komponen – komponen hukum untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan narapidana mendapatkan informasi mengenai hak – hak narapidana, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, para pembuat peraturan memperjelas setiap isi dari pasal – pasal yang mengatur tentang remisi yang dibuat.
- b. Faktor penegak hukumnya, para penegak hukum yang berperan sebagai penerap peraturan harus melaksanakan kewajiban – kewajibannya semaksimal mungkin sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan dan melakukan kewajibannya tanpa menunda – nunda waktu yaitu memproses usulan remisi secara cepat dan tepat sehingga putusan mengenai pemberian remisi dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu. Dan adanya komunikasi antara para penegak hukum.

- c. Faktor sarana dan fasilitas, adanya penyeleksian yang lebih ketat untuk penerimaan pegawai baru Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Pengetatan seleksi dilakukan sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri yang mana pegawai yang akan diseleksi itu memiliki kemampuan dibidangnya.
- d. Faktor masyarakat, penegak hukum tidak hanya melakukan kegiatan atau usaha yang bertujuan agar warga taat dan patuh pada hukum. Karena cara itu hanya menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya bahkan masyarakat hanya patuh saat ada petugas saja. Cara ini harus dirubah yaitu para penegak hukum memberikan sosialisasi mengenai hukum.
- e. Faktor kebudayaan, menyatukan faktor kebudayaan dengan masyarakat. Penyatuan dilakukan untuk menciptakan adanya keserasian dan keseimbangan.

Mengukur efektivitas pemberian remisi bagi narapidana sejak diberlakukannya PP 99 Tahun 2012 selain melihat dari pandangan petugas lapas dan narapidananya secara langsung tentu juga harus dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pemberian remisi bagi narapidana. Secara teknis terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. untuk narapidana yang terkena PP no 28 tahun 2006, cukup di ajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi di ajukan sampai ke pusat. Narapidana yang di pidana lebih lima tahun akan terkena PP no 99 tahun 2012, jika putusan setelah tanggal 12 November 2012. Sebelum itu terkena PP no 28 tahun 2006.

Dalam PP 99 Tahun 2012 juga terdapat perubahan waktu pemberian remisi. Dalam PP 28 tahun 2006, narapidana boleh mendapat remisi setelah

menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan dalam PP 99 tahun 2012, narapidana boleh mendapat remisi setelah 6 (enam) bulan menjalani masa pidana. Narapidana narkoba, setelah di putus bersalah maksimal tanggal 17 februari 2013 baru boleh mendapat remisi, kalau lebih dari itu menunggu tahun depan untuk dapat remisi khusus. Sebagai contoh, narapidana A yang mendapat hukuman 5 tahun, kalau masih menggunakan pp yang lama, setidaknya masih 2 tahun lagi mendapat remisi, dengan adanya peraturan yang baru maka A sudah bisa diajukan untuk memperoleh remisi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, yakni karena PP Nomor 99 tahun 2012 masih tergolong baru, maka perlu penyesuaian terhadap narapidana, selanjutnya banyaknya jumlah narapidana di Lapas Klas 1 Makassar, tidak hanya narapidana pelaku tindak pidana khusus saja yang mendapatkan remisi, semua narapidana berhak mendapatkan remisi sehingga memerlukan waktu dalam sidang TPP, adanya narapidana yang mendapat hukuman disiplin sehingga tidak bisa mendapat remisi.

Terkait dengan masalah dampak pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012 ini hasil wawancara penulis dengan Faisal Ramadhani menyatakan bahwa :²⁵

“Dampak pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012 terhadap narapidana akan lebih lama menjalani masa hukuman karena tanpa remisi. Sementara mengenai pengetatan pemberian remisi apakah sudah ketat, kalau untuk semangat anti rasuah (Tindak Pidana Korupsi) sudah tepat akan tetapi di sisi lain harus sesuai dengan kaidah hukum yang benar, karena tidak boleh PP No. 99 Tahun 2014 bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 sesuai dengan asas hukum Lex superior derogat lex inferior bahwa secara

²⁵ Faizal Ramadhani, Wawancara, Staf Data Base Seksi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 9 Mei 2017

hierarkis suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengukur bagaimana efektivitas pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012 tentu dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri. Untuk lapas Klas 1 Makassar pasca penerapan PP No. 99 tahun 2012 dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari petugas lapas klas 1 Makassar. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Hal itu mendasari pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus.

Dengan adanya pemberian remisi tersebut menandakan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi cukup ketat. Dari sisi efektivitas maka tentunya para para pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah efektifitas penerapan PP No. 9 Tahun 2012 cukup membuat para terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik akan tetapi di sisi lain keberadaan PP ini menurut Faisal Ramadhani masih kurang efektif dalam hal pembinaan.

Pemberian remisi dari sisi efektivitas memberikan suatu gambaran bahwa spirit penegakan hukum kita masih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya represif. Keberadaan PP No 99 Tahun 2012 bukanlah solusi dalam memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana khusus, justru di sisi lain akan

menimbulkan persoalan hukum baru karena adanya pergeseran paradigma pembedaan dan bertentangan dengan aturan hukum yang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Kemasyarakatan Klas I Makassar di lakukan yang di sesuai dengan pasal 34 dan 34 A ayat 1 PP Nomor 99 tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Serta Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
2. Efektifitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala-kendala khususnya pada syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana khusus sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus.
2. Pemerintah perlu mengkaji ulang pengetatan pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus.
3. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penerapan PP No. 99 Tahun 2012 khususnya pada pelaku tindak pidana korupsi dalam membongkar kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- A. Tumpa, Harifin. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Andi Natsif, Fadli. *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2016
- Andi Natsif, Fadli. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Makassar: Bahan Power Point Kuliah). 2014
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
- Chazaw, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012
- Djisman Samosir, D. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam*. Makassar : Alauddin University Press, 2014
- Sahetapy, J.E. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Kumkelo, Mujaid dkk. *Fiqh HAM*. Malang, Jawa Timur: Setara Press. 2015
- Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia edisi kedua*. Cet.II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Priatno, Dwidya. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Cet.3 Bandung:Refika Aditama, 2013
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Sampara, Said. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2009

Sujatno, Adi. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2000

Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial* Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan Cet IV*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006

B. Sumber Lain

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Republik Indonesia , Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Agung Firmansyah, Mohammad. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus*, Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2013

Muhammad, Marie. *Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sungguminasa*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014.

Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010

C. Internet

<http://kompas.com/IndraAkuntono.DeytriRobekkaAritonang.batasiremisidenganundang-undang>. diakses pukul. 16:30 WITA, 20 November 2016

<http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada pukul 15.30 Wita, tanggal 10 November 2016.

<http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada pukul 15.30 Wita, tanggal 10 November 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hal : Permohonan Judul Skripsi
Kepada Yth,
Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM SUYUTI IKHSAN
NIM : 10500113124
Semester/klpk : VI/C
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

Acc
27/6/16
*

1. TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
2. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.
3. TINJAUAN HUKUM ASAS PRADUGA BERSALAH OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENYELIDIKAN

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Samata, 27 Juni 2016

Mengetahui,

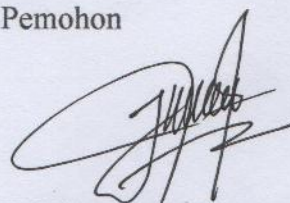
Penasehat Akademik

Pemohon



AHKAM JAYADI, SH, MH

NIP. 196110241987031003




ILHAM SUYUTI IKHSAN



RAHMAN SYAMSUDDIN
NIP 19821207 200901 1 010

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI/MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
RUMUSAN MASALAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang terhadap pemberian remisi narapidana korupsi ? 2. Sejauhmana implementasi mengenai syarat pemberian remisi narapidana korupsi ? JUDUL SKRIPSI TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI.	27/6/16	 RAHMAN SYAMSUDDIN NIP 19821207 200901 1 010
RUMUSAN MASALAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauhmana Undang-Undang Mengatur kewenangan kejaksaan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ? 2. Bagaimana efektifitas jaksa dalam memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi ? JUDUL SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.		
RUMUSAN MASALAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan terkait asas praduga bersalah oleh penegak hukum dalam proses penyelidikan ? 2. Sejauhmana penerapan aturan asas praduga bersalah oleh penegak hukum dalam proses penyelidikan ? JUDUL SKRIPSI TINJAUAN HUKUM ASAS PRADUGA BERSALAH OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENYELIDIKAN		
PEMBIMBING	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI KETUA JURUSAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 		



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 740 Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : **1. Rahman Syamsuddin., SH., M.H**
2. Dr. Fadli A. Natsif., SH., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Ilham Suyuti Ikhsan
N I M : 10500113124
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **"Pelaksanaan Pemberian remisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012"**

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 22 Desember 2016



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

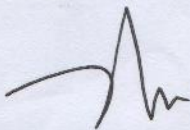
NIP. 19621016 199003 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Disusun dan Diajukan Oleh
ILHAM SUYUTI IKHSAN
NIM : 10500113124

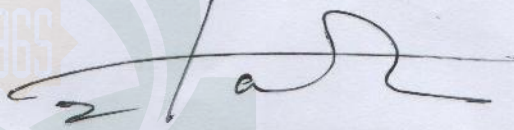
Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
Penulisan skripsi
Pada tanggal : 11 April 2017

Pembimbing I



RAHMAN SYAMSUDDIN, SH., MH.
NIP. 19821207 200901 1 010

Pembimbing II



Dr. FADLI ANDI NATSIF, SH., MH.
NIP. 19661016 201411 1 001

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Istiqamah, SH., MH.
NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : 1700 SI.1/PP.00.9/04/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 13 April 2017

Kepada
Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan**
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Ilham Suyuti Ikhsan
N I M : 10500113124
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

"Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan "

Dengan dosen pembimbing:

1. **Rahman Syamsuddin,SH.,MH**
2. **Dr. Fadli Andi Natsif,SH.,MH**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar terhitung mulai tanggal 13 April 2017 s/d 13 Mei 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



ALAUDDIN
MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax 864923

Kampus III : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 29 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
 Nama : Ilham Suyuti Ikhsan
 N I M : 10500113124
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Hari/Tanggal : Jum.at, 2 Juni 2017
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
 Judul : "Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Peraturan
 Pemerintah No. 99 (Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan
 Kelas I Makassar"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Ahkam Jayadi, S.H, M.H.
Penguji : St. Nurjannah, S.H, M.H.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di
 Pada tanggal

: Samata
 : 30 Mei 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 1974/SL.1/PP.00.9/ S. /2017

Sifat : Penting

Lamp :

Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 30 Mei 2017

Kepada

- Yth.
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Istiqamah, S.H., M.H. (Sekertaris)
 3. Ahkam Jayadi, S.H., M.H. (Penguji I)
 4. St. Nurjannah, S.H, M.H. (Penguji II)
 5. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H. (Pembimbing I)
 6. Dr. Fadli A. Natsif, M.H. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana.

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Ilham Suyuti Ikhsan

N I M : 10500113124

Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum,at, 2 Juni 2017

Waktu : Pukul 10.00-11.00 Wita

Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 19621016 199003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 724 Tahun 2017

TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Ilham Suyuti Ikhsan
N I M : 10500113124
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
Penguji II : St. Nurjannah, S.H., M.H.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 12 Juni 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 2018/SI.1/PP.00.9/..6./2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 12 Juni 2017

Kepada
Yth.

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqmah, S.H., M.H. (Sekertaris)
3. Ahkam Jayadi, S.H., M.H. (Penguji I)
4. St. Nurjannah, S.H., M.H. (Penguji II)
5. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (Pembimbing I)
6. Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Ilham Suyuti
N I M : 10100113124
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR”** bernama lengkap **ILHAM SUYUTI IKHSAN**, Nim : **10500113124**, Lahir di Bulukumba, 03 Februari 1995, Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Ikhsan dan Ibu Megawati.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 13 Salemba tahun 2001-2007 Sampai Penulis menempuh pendidikan di SMPN 3 Bulukumba, sekarang SMPN 10 Bulukumba, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Ujungloe, sekarang SMA Negeri 9 Bulukumba, Tahun 2010-2013. Kemudian tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Seleksi Ujian Masuk Mandiri (UMM) dan lulus di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R